

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN MALADMINISTRASI TERHADAP
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN 2021 OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH**

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi fenomena adanya temuan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang beragam setiap tahunnya, seperti ketidaksesuaian titik koordinat, kesalahan data kependudukan, permasalahan domisili, perubahan daya tampung, masalah teknis aplikasi, pungutan, dan lain sebagainya. Dari permasalahan tersebut selanjutnya muncul pertanyaan, sejauh mana efektivitas pengawasan PPDB yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia untuk mewujudkan PPDB tanpa maladministrasi?

Dengan mengambil studi kasus pada penyelenggaraan PPDB tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah, Tesis ini bermaksud menggambarkan dan menganalisis efektivitas pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah serta praktik maladministrasi yang ditemukan untuk selanjutnya menjadi saran perbaikan penyelenggaraan PPDB di tahun mendatang.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan analisis terhadap teori efektivitas dengan data penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan yang terdiri dari Kepala dan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Panitia Penyelenggara PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, serta masyarakat umum yang mengakses PPDB tahun 2021. Dengan menggali kebenaran informasi baik melalui wawancara dan kuesioner maupun data sekunder serta dokumentasi media cetak dan media *online*, maka diperoleh simpulan bahwa pengawasan PPDB yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah efektif. Namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan sistem pengawasan, mengingat luasnya wilayah Provinsi Jawa Tengah serta ketersediaan sumber daya yang minim. Upaya yang berkesinambungan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam menangani maladministrasi pada penyelenggaraan PPDB, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengambilan kebijakan PPDB mendatang.

Kata Kunci: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Efektivitas, Pengawasan PPDB